

Pandangan Hidup Komunitas Santri

FUADUDDIN TM

Ahli Peneliti Utama pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

HUSEN HB

Staf Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

The community of Santri (students of Pondok Pesantren) — as a part of the social structure of Indonesia people culturally has any typical characteristics including their philosophy of life (=value orientation, belief, perspective, and the mode of conduct in their daily life) because of their socio-cultural and ecological environment. The research taking six provinces (=1440 santries, at eleven pondok pesantrens/boarding religious education institutions), held by Husen & Fuaduddin, aim at empirically understand how the santri's community explains comprehensively their meaning of life according to their religious belief. The research intends to explore some philosophical characteristics concerning with the concept of life destination, truth, plurality, tolerance, jihad, life-ethos, and also some doctrinal perceptions of the politico & socio-religious issues appearing significantly in the world today.

I. Pendahuluan

Sampai saat ini pendidikan pesantren telah melakukan transformasi di berbagai dimensinya. Dinamika pendidikan pesantren

tersebut merupakan respon terhadap perubahan sosial masyarakat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi yang sedang berlangsung. Kondisi ini sedikit banyaknya akan

mempengaruhi pemikiran, pemahaman keagamaan dan pada gilirannya memberikan warna tersendiri terhadap pandangan hidup santri.

Bentuk perubahan sebuah pesantren terlihat lebih diwarnai oleh pemahaman keagamaan pimpinan pesantren (kiyai) sebagai pemimpin karismatik yang mengajarkan faham keagamaan dan sekaligus sebagai panutan dalam pemikiran, sikap dan perilaku santri. Kiyai sebagai elemen yang paling essential dari sebuah pesantren, yang dengan kelebihan ilmunya dalam Islam seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga demikain mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau oleh kebanyakan masyarakat awam (Dhofir; 1982).

Perkembangan pemikiran dan faham keagamaan yang beragam dari pimpinan pesantren pada akhirnya akan melahirkan orientasi pendidikan dan nilai-nilai budaya pesantren yang sangat beragam. Dengan kata lain perkembangan pesantren merupakan refleksi dari peta pemahaman dan arus pemikiran keagamaan yang melahirkan pandangan hidup, sikap dan perilaku para santri yang sangat beragam pula.

Keragaman orientasi dan sistem pendidikan pesantren dengan faham keagamaan yang dikembangkan di dalamnya diperkirakan akan terbangun keragaman pandangan hidup santri yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa mendatang. Karena pandangan hidup seseorang akan membimbing dan mengarahkan bagaimana memaknai semua persoalan-persoalan strategis dan penting dalam kehidupan.

Pandangan hidup seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor atau variabel. Salah satunya adalah variabel budaya yang ada di masyarakat dan nilai-nilai budaya yang bersumber dari pemahaman ajaran agama akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kelompok tertentu yang kemungkinan tidak sejalan dengan tradisi mainstream.

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan memandang penting penelitian tentang pandangan hidup santri khususnya yang berkaitan dengan makna dan tujuan hidup, makna agama bagi kehidupan, pluralisme (keragaman) dan toleransi dan etos belajar atau pendidikan. Studi ini semakin strategis pada saat pesantren justru sedang dihadapkan dengan persoalan-persoalan issue radikalisme agama dan terorisme yang

menempatkan pesantren seperti sebagai tersangka.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pandangan hidup santri yang berkaitan dengan makna dan tujuan hidup, makna agama bagi kehidupan, pluralitas dan toleransi, etos belajar (pendidikan), sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan pesantren di masa mendatang.

Penelitian ini dilakukan di 6 propinsi. Sasaran penelitian dilakukan di 11 pondok pesantren dengan jumlah responden sebanyak 1446 santri. Kesebelas pondok pesantren itu adalah Persis Bangil Jawa Timur (salafi), Tebu Ireng Jawa Timur (salafi tradisional), Lirboyo Jawa Timur (salafi), Maslakul Huda Jawa Tengah (salafi tradisional), Ngruki Jawa Tengah (salafi haraki), Raudlotuttalibin Jawa Tengah (salafi tradisional), Musyaddadiyah Jawa Barat (tradisional), Darul Arqam Jawa Barat (modern/muhamadiyah), Musthafawiyah Sumatra Utara (tradisional), Darussalam Kalimantan Selatan (kekhususan/tradisional salafi), dan Darunnajah DKI Jakarta (modern).

II. Hasil penelitian

A. Konsepsi Manusia dan Tujuan

Manusia dalam berbagai teks suci baik dalam al-Quran, hadis ditempatkan pada posisi yang terhormat sebagai khalifah dimuka bumi, Konsep khalifah mengandung makna kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola bumi seisinya sebagai amanah. Manusia diberi kebebasan dan kekuasaan untuk memanfaatkan semua potensi alam untuk kesejahteraan manusia serta semua makhluk Tuhan. Dalam mengelola alam dan seisinya manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap peran yang dilakukan serta amanah yang diberikan kepadanya. Karenanya konsep "keadilan" menjadi salah satu fundamental yang harus ditegakkan bagi setiap manusia dalam memerankan kekhalifahannya.

Siapa saja sebenarnya yang dimaksud manusia yang diberi kewenangan dan kekuasaan sebagai khalifah? Apakah menjadi monopoli umat Islam atautkah semua manusia memiliki kesempatan sama untuk menjadi khalifah tanpa membedakan latarbelakang ras, etnik, agama dan golongan?

Tabel 1.

Siapa saja manusia yang berhak menjadi khalifah

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Hanya muslim	182	12,6
b. Semua manusia terutgama muslim	515	35,6
c. Semua mamnesia tanpa membedakan etnik dan agama	478	33,1
d. Manusi yang memiliki keahlian	258	17,7
e. Tidak menjawab	15	1,1
Jumlah	1446	100

Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah terbesar 515 santri (35,6%) menyatakan bahwa semua manusia, khususnya umat Islam yang berhak menjadi khalifah. Bahkan 478 santri (33,1%) menyatakan semua manusia tanpa membedakan latarbelakang etnik, ras, golongan dan agama memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memerankan kekhalifahan di muka bumi. Mereka yang memiliki keahlian atau kompetensi saja yang berhak menjadi khalifah 17,7%. Responden yang menyatakan hanya umat Islam yang berhak menjadi khalifah menempati urutan terakhir 12,6%.

Untuk menjalankan peran kekhalifahan, manusia harus memiliki persyaratan-persyaratan baik persyaratan kesadaran iman dan takwa, keilmuan, moralitas, kompetensi

individual, profesional maupun sosial. Kompetensi iman dan takwa diperlukan agar manusia dalam memerankan kekhalifahan senantiasa diyakini sebagai sedang melaksanakan tugas-tugas suci yang harus memperhatikan tata aturan dan norma-norma "ketuhanan". Itulah sebabnya manusia senantiasa diingatkan agar pada saat yang melaksanakan peran kekhalifahan juga memerankan tugas-tugas kehambaan.

Tabel 2.
Persyaratan manusia menjadi khalifah

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT	133	9,2
b. Beriman, bertakwa dan berilmu	264	18,3
c. Beriman, bertakwa, berilmu dan berakhlak	119	8,2
d. Beriman, bergakwa, belimu, akhlak dan diteri semua orang	922	63,8
e. Tidak mengisi	4	0,5
Jumlah	1446	100

Data tersebut menunjukkan bahwa para santri menerima realitas bahwa tugas kekhalifahan sangat beragam dan kompleks dalam mengatur semua aspek kehidupan. Tentunya tidak mungkin hanya menggunakan klaim agama atau kelompok untuk memberi legitimasi keabsahan peran kekhalifahan. Semua manusia dengan persyaratan moral, keilmuan, keahlian dan akseptabel (diterima) semua orang menjadi tuntutan profesionalitas dalam dunia modern (63,8%). Konsep khalifah yang hanya didasarkan pada legitimasi moralitas dan keilmuan semata tidak lagi populer dikalangan santri (18,3%). Apalagi hanya dengan legitimasi imtak (moral) menempati urutan paling bawah 9,2%.

Persyaratan status dan peran khalifah untuk mengelola alam dan kehidupan mempersyaratkan konsep pertanggung jawaban yang melekat sebagai konsekuensi dari kewenangan dan kekuasaan yang diberikan. Karena kewenangan dan kekuasaan tersebut berasal dari legitimasi Tuhan dan manusia, maka bentuk pertanggung jawabannya mencakup dimensi kemanusiaan dan ketuhanan. Artinya setiap orang akan bertanggung jawabkan apa yang dilakukannya kepada manusia dan Tuhan (67,2%). Pertanggung jawaban kepada manusia akan berhadapan semua tata aturan yang harus ditaati dalam semua peran yang dilakukan. Bila manusia melanggar tata aturan yang disepakati, maka akan berhadapan dengan sanksi.

Sebaliknya bila dia berhasil dan taat atauran akan memperoleh reward atau penghargaan.

Pertanggung jawaban hanya kepada Tuhan semata (23,9%) dianggap tidaklah cukup, karena dalam kehidupan apalagi menyangkut urusan publik ada tata aturan yang dibuat, disepakati dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Ketika norma agama dilembagakan dan semua anggota masyarakat menyepakati, maka jadilah hukum yang mengikat yang akan mengatur semua orang sebagai anggota masyarakat. Karena agama memang menghendaki keteraturan, kebersamaan untuk kesejahteraan bersama.

Manusia sebenarnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan senantiasa mengikuti pikiran dan hatinuraninya sendiri. Karenanya tidak sedikit manusia tidak akan berani melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hatinuraninya sendiri. Artinya memang ada diantara responden bahwa manusia pada dasarnya harus mempertanggung jawabkan terhadap hatinuraninya sendiri (3,9%).

Dalam al-Quran dijelaskan bahwa "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib manusia, sehingga manusia tersebut merubah dirinya". Manusia memiliki kebebasan untuk mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan akal-

Tabel 3.

Pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Kepada Diri sendiri	57	3,9
b. Kepada Allah SWT	345	23,9
c. Kepada sesama manusia	66	4,6
d. Kepada manusia dan Allah	971	67,2
e. Tidak mengisi	7	0,5
Jumlah	1446	100

nya dalam melaksanakan perannya sebagai khalifah (14,7%). Dengan kemampuan akalnya manusia mempelajari, mengkaji dan meneliti ayat-ayat Allah baik ayat-ayat qauliyah/ Quraniyah maupun ayat-ayat Kau-niyah. Melalui kajian dan penelitian tersebut manusia dapat melaksanakan peran kekhalifahannya secara optimal dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberi mandat.

Peran khalifah sangat kompleks karena mencakup semua aspek kehidupan. Manusia harus bekerja keras dan cerdas (71,22%), agar peran tersebut dapat berhasil dengan baik. Untuk pembangunan kualitas SDM menjadi prioritas (12,9%). Tuhan tidak terlibat lagi dalam aktifitas manusia sebagai khalifah (06%).

Manusia juga sebagai makhluk terpilih/pilihan dituntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah

SWT. Ibadah dalam arti luas pada dasarnya adalah sarana komunikasi antara Tuhan dengan khalifahnya untuk kebaikan dirinya dan keberhasilan peran yang dilakukan. Kedekatan dengan tuhan diharapkan diperlukan dalam bentuk atau melalui ibadah ritual (10,1%). Anjuran untuk ibadah harus dimaknai agar semua perbuatan atau karya yang dihasilkan dengan niat untuk atau karena Allah semata. Dalam konsep Tauhid Uluhiyah memang difahami bahwa seseorang beramal hanya karena Allah. Bila saja beramal bukan karena Allah maka dianggap musyrik. Informasi yang menarik adalah pemahaman ibadah hanya dimaknai kepada ibadah shalat atau ibadah ritual lainnya ternyata hanya 10,1%, artinya ibadah yang terbatas pada kesalehan individual sudah tidak populer lagi dalam pandangan santri. Sebaliknya ibadah yang berimplikasi kepada kesalehan

Tabel 4.

Kebebasan manusia dalam melaksanakan peran kekhalifahan

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Tuhan tidak terlibat dalam urusan manusia	9	0,6
b. Manusia menentukan dirinya	212	14,7
c. Manusia harus bekerja keras	1030	71,2
D. Membangun kualitas SDM	186	12,9
e. Tidak mengisi	9	0,6
Jumlah	1446	100

sosial berbuat baik karena Allah (61,3%), ibadah ghoir mahdhah (18,7%) serta berbuat baik sesama manusia 8,8%.

Para responden menempatkan persyaratan khalifah dengan perilaku Abid (66,5%) seperti memiliki kompetensi moral, jujur, adil, peduli

faatkan alam seisinya untuk semua kebutuhan hidupnya. Namun mengandalkan akal semata manusia dapat berbuat kesalahan yang berakibat peran kekhalifahannya tidak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu ada aturan-aturan, petunjuk yang berasal

Tabel 5.
Makna ibadah kepada Allah SWT

Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a. Sholat dan ibadah mahdhoh lainnya	146	10,1
b. Shalat, ibadah mahdhah dan ghoir mahdhoh	270	18,7
c. Semua perbuatan dilakukan karena Allah	887	61,3
d. Berbuat baik sesama manusia	127	8,8
e. Tidak mengisi	16	1,1
Jumlah	1446	100

sesama, ikhlash, dsb. Artinya siapa saja yang berhak memperoleh predikat khalifah adalah mereka yang memiliki komitmen moral.

B. Makna Agama Bagi Kehidupan

Manusia dengan kemampuan akalnya semata mungkin dapat mempelajari, meneliti dan meman-

dari Tuhan yang harus dipegang oleh manusia dalam menata kehidupan yang multi dimensional.

Berpedoman pada konsepsi-konsepsi dan pemikiran-pemikiran akal murni yang nisbi, tidak cukup untuk mengantar manusia kepada ketenteraman dan kebahagiaan hidup. Betapa pintarnya manusia dan betapa hebatnya akal, namun terlalu banyak hal-hal yang tidak dapat dipecahkan oleh akal murni.

Agama memberikan pedoman dan rambu-rambu mulai dari pembebasan manusia dari perbuatan syirik, menyekutukan Tuhan. Perbuatan syirik justru menyalahi status dirinya sebagai khalifah yang harus mengatur alam seisinya. Artinya manusia atas nama Tuhan memiliki status tertinggi dan kekuasaan yang melebihi alam dan makhluk lainnya. Kalau saja manusia berbuat syirik, artinya manusia menjatuhkan derajat dan martabat dirinya sendiri.

Agama juga memberikan petunjuk bagaimana seorang khalifah melakukan komunikasi dengan Tuhan agar semua tugas dan peran khalifah tidak menyimpang dari aturan dan rambu-rambu yang

diciptakan Tuhan. Melalui komunikasi yang intensif manusia dapat membangkitkan optimisme dan menjadi sumber motivasi agar tugas kekhalfahan berhasil baik dan memperoleh reward.

Agama juga memberikan pedoman dasar dan ketentuan-ketentuan pokok dalam mengatur kehidupan individu, hubungan antar sesama manusia dan makhluk lainnya. Dengan pesan-pesan agama manusia dapat mengatur kehidupannya yang rukun, harmonis dan bermartabat. Tanpa pedoman yang jelas manusia dapat membuat kesalahan dan berakibat gagalnya misi kekhalfahan.

Tabel 6.
Agama sebagai pedoman hidup siapa

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Pedoman hidup perseorangan	104	7,2
b. Pedoman hidup individu dan masyarakat	168	11,6
c. Pedoman hidup individu, masyarakat dan Negara	751	51,9
d. Pedoman untuk semua manusia (global)	399	27,6
e. Tidak mengisi	24	1,6
Jumlah	1446	100

Lebih dari setengah jumlah responden mengakui bahwa agama seharusnya menjadi pedoman hidup perseorangan, masyarakat dan Negara. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep Islam yang difahami sebagai Ad Din wa Daulah. Ungkapan Islam Kaffah menyertakan makna bahwa setiap muslim baik secara individu, masyarakat maupun bangsa dan Negara seyogyanya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Krisis yang terjadi di Indonesia sebagian masyarakat menawarkan Syariat Islam sebagai solusinya.

Sebagian responden cenderung memandang Islam sebagai pedoman hidup untuk seluruh manusia atau menjadikan Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan. Hal ini dikaitkan dengan kedatangan risalah Muhammad sebagai rasul penutup memiliki tugas risalah untuk seluruh manusia. Konsep khilafah yang mengajarkan perlunya kesatuan umat di bawah seorang khalifah, merupakan aktualisasi peran kekhalifahan yang memerlukan kelembagaan.

Bagi responden yang memandang Islam sebagai pedoman hidup individu dan urusan kemasyarakatan menempati urutan ketiga dengan jumlah 11,6% dan urutan terakhir

Islam sebagai pedoman hidup individu 7,2%. Dari data tersebut terdapat kecenderungan menguatnya pandangan di kalangan santri bahwa Islam sebagai agama seyogyanya mengatur kehidupan yang lebih luas, bukan hanya urusan ibadah (individu), tetapi juga masalah-masalah publik (kemasyarakatan), negara bahkan dalam hubungan internasional.

Dalam penerapan ajaran Islam sebagai pedoman hidup baik secara individu, kemasyarakatan, urusan negara bahkan dalam skala global, responden memandang sebaiknya dilakukan melalui proses pendidikan, dakwah dan urusan muamalah. Adapun pandangan yang melihat jihad sebagai jalan menuju penerapan syariat Islam ternyata menempati urutan terakhir. Artinya para santri melihat upaya yang lebih sesuai dengan peran-peran pendidikan dan dakwah yang menyampaikan Islam secara damai. Proses sosialisasi ajaran Islam kepada masyarakat melalui pendidikan dan dakwah yang menjadikan pesantren sangat strategis.

Tabel 7.
Penerapan Islam sebagai pedoman hidup

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Melalui pendidikan	556	38,5
b. Melalui pendidikan dan dakwah	149	10,3
c. Pendidikan, dakwah dan muamalah	670	46,3
d. Melalui Jihad fi sabilillah	62	4,3
e. Tidak mengisi	9	0,7
Jumlah	1446	100

Pandangan tersebut juga terlihat dari usulan berbagai kalangan umat Islam untuk meningkatkan peran pendidikan agama baik pendidikan agama di sekolah umum sebagai bagian dari kurikulum pendidikan sekolah, pendidikan madrasah, pondok pesantren maupun pendidikan keagamaan luar sekolah.

C. Pluralitas dan Toleransi

Dunia pesantren dalam beberapa dekade telah membuka diri terhadap dunia luar, menerima secara selektif dan cerdas sistem pendidikan modern, tanpa menghilangkan misi dan jati dirinya sebagai lembaga keagamaan dan dakwah. Prinsip memelihara yang baik dan

menerima yang baru yang lebih baik, terlihat dari penerimaan terhadap realitas keragaman baik keragaman etnik, ras, golongan dan agama merupakan sunnatullah (27,9%), karena manusia tidak dapat hidup sendirian dan karenanya memerlukan bantuan orang lain (45,8%), umat Islam harus belajar kepada orang lain (14,2%). Dan bila suatu pekerjaan harus diserahkan kepada mereka yang memiliki keahlian, tanpa membedakan latar belakang perbedaan etnik, golongan dan agama (11,3%).

Tabel 8.
 Pandangan santri tentang keragaman yang ada

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Keragaman adalah sunnatullah	403	27,9
b. Manusia tidak dapat hidup sendiri	662	45,8
c. Pekerjaan harus diserahkan kepada ahlinya	164	11,3
d. Perlu belajar kepada siapa saja	205	14,2
e. Tidak mengisi	12	0,9
Jumlah	1446	100

Keragaman mengharuskan umat Islam dapat bekerjasama, hidup harmonis, saling menghargai dan mengakui keberadaan masing-masing. Kerjasama dimaksudkan adalah kerjasama kegiatan sosial yang konkrit dirasakan bersama (31,1%), yapi kegiatan-kegiatan diluar kegiatan ibadah (muamalah) 26,3%), kerjasama memberantas kebodohan dan kemiskinan, bukan untuk kegiatan ritus keagamaan (17,8%).

Pluralitas dimaksudkan responden adalah keragaman etnik, suku bangsa, ras, budaya dan agama. Karenanya terhadap konsep pluralitas agama yang dijadikan wacana oleh para tokoh lintas agama, mereka menolak pluralisme agama yang diartikan setiap agama memiliki kesamaan kebenaran relative (8,0%). Mereka mengakui ada kebenaran pada setiap agama,

namun yang paling benar adalah Islam (47,8%). Sebagian memahami agama sebagai aturan yang diyakini dan diamalkan, bukan untuk sekedar dikaji dan dibandingkan (26,3%). Pandangan ini didasari kepada semakin banyaknya kajian dan pemikiran dalam Islam namun tidak terlihat dalam tindakan atau amaliyahnya. Karenanya mereka menolak berbagai bentuk kajian kritis yang semata-mata hanya sebuah wacana bukan untuk peningkatan pengamalan.

Tabel 9
 Pandangan santri tentang pluralitas agama

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Hanya Islam yang benar	247	17,1
b. Ada nilai-nilai kebenaran pada setiap agama, Islam paling benar	691	47,8
c. Hanya ada kebenaran relatif pada setiap agama	116	8,0
d. Agama untuk diamalkan, bukan dibandingkan	380	26,3
e. Tidak mengisi	12	0,8
Jumlah	1446	100

Sebagian responden ada yang mengklaim bahwa hanya Islam yang benar (17,1%). Secara normative banyak pesan-pesan teks suci yang menyiratkan Islam sebagai agama yang telah disempurnakan dan diterima disisi Tuhan. Sementara agama lainnya dinyatakan telah berakhir masa pemberlakukannya begitu Islam datang.

Namun realitas tersebut menunjukkan bahwa agama merupakan sesuatu yang amat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Radea mengutip Sosiolog Peter L Berger dalam pengantar buku *A Rumor of Angels: Modern and Society and the Rediscovery of the Supernatural*, menggariskan sebuah keyakinan yang tak bisa diragukan bahwa agama adalah *sacred canopy*

yang sanggup melindungi manusia dari *chaos*, yaitu situasi yang tanpa arti. Agama menurut dia, adalah semesta simbolik yang mampu memberi makna pada kehidupan manusia. Karena itu agama akan tetap menjadi sesuatu yang amat penting dan dibutuhkan sampai kapanpun juga.¹

D. Pandangan Tentang Jihad

Penghayatan terhadap agama di satu sisi menghasilkan nilai-nilai humanistik, seperti cinta-kasih, tolong menolong, perdamaian yang dalam bahasa teologi disebut Basyiiron (reward; memberikan khabar gembira, janji kebaikan). Namun pada saat yang sama penghayatan

¹ Radea Juli A Hambali, Agama, Fundamentalisme, dan Pluralisme Nilai, Kompas, Jumat, 27 September 2002.

terhadap agama dapat menghasilkan tindakan kepastian hukum (otoritarian) seperti menciptakan kekerasan dan menjastifikasinya atau bersifat *Nadhiran* (ancaman hukuman atau siksaan). Jadi agama yang dianut setiap kelompok masyarakat hasilnya tidak sama, atau ambivalensi menjadi humanistik atau otoritarian tergantung sudut pandang yang digunakan.

Dalam Islam ada ajaran tentang tolong menolong, menyantuni kaum dhu'afa, yatim piatu, pemerataan kesejahteraan, berlaku adil, kejujuran, moralitas serta kepedulian sosial lainnya. Semuanya sering tertuang dalam konsep amar ma'ruf baik secara individual maupun sosial. Namun pada sisi lain bila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka perlu ditegakkan nahi munkar. Karenanya dalam Islam ada doktrin syahid, kematian guna melawan musuh Tuhan. Konsepsi syahid tersebut mendapat justifikasi dari teks-teks suci, bahkan dijanjikan mendapat pahala yang setimpal di hari kemudian. Di sisi lain, dalam teks suci terdapat doktrin al-irhab, yaitu perlawanan. Al-Quran menye-

butkan sebagai upaya melawan musuh Tuhan, misalnya, dalam QS 8:60 dan QS 9:123). Untuk dapat tegaknya amar makruf nahi munkar, menjamin keadilan dan terlaksananya hukum, ada kelompok masyarakat tertentu melihat akan pentingnya sebuah negara Islam. Karena tanpa adanya negara Islam, maka eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar: yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlaq semata. Karena itu, negara Islam harus senantiasa ada dan keberadaannya juga tidak hanya temporal saja.² Meskipun demikian ada juga kelompok yang berpandangan berbeda seperti yang dimotori oleh Mohammed Arkoun. Arkoun menolak pembentukan negara Islam. Ia lebih menyetujui terbentuknya negara demokratis yang tidak mengenal pertentangan antara nalar agama dan nalar filsafat.³

Upaya pelembagaan ajaran agama (Syariat Islam) tidak menutup kemungkinan munculnya semangat fundamentalisme, karena penerapan bagi kelompok tersebut adalah

² Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, yang diterjemahkan oleh Drs. M. Maghfur, Bangil-Jatim: Darul Ummah, cetakan VI, 2002, p: 9.

³ Suwardi Putro, *Mohammed Arkoun tentang Islam Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998, p: 82.

sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan meskipun terkadang dengan cara-cara yang radikal. Menurut mereka upaya penerapan Syariat Islam merupakan jihad. Siapapun yang menghalangi dianggap "jihad" terhadap mereka. Maka berkembanglah pemaknaan jihad yang semakin meluas dan sering keluar konteks baik dalam perspektif tafsir ala anh Ash atau tafsir ala dhahir.

Dalam berbagai lektur keagamaan terdapat penafsiran jihad. Tafsir pertama, jihad berarti "qital" perang terhadap orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Kedua, jihad dimaknai sebagai berupaya, mengerahkan segala kemampuan untuk berbuat kebaikan (sabiilul khairat). Persoalannya adalah dalam konteks Indonesia sekarang, bagaimana pandangan para santri terhadap makna jihad.

Jumlah terbanyak responden memandang jihad yang paling tepat

dimaknai bekerja bersungguhsungguh, mengerahkan segala kekuatan dan pikiran untuk memberikan kebaikan sesama warga bangsa yang sekarang sedang menghadapi krisis multi dimensi. Pemaknaan jihad dalam pandangan santri ini dapat diartikan sebagai salah satu indikasi kesadaran mereka terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang memerlukan kesungguhan upaya dengan pmbenaran teologis. Bahkan diantara responden secara lebih konkrit jihad lebih tepat dimaknai sebagai upaya memerangi kebodohan dan kemiskinan yang masih melanda sebagian masyarakat Indonesia.

Pada sisi lain terdapa konsep Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar (kejahatan). Suruhan tersebut banyak yang memahaminya sebagai suatu kewajiban. Karenanya terdapat 30,2%

Tabel 10
Makna jihad dalam konteks kekinian

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Perang terhadap orang kafir	109	7,5
b. Bekerja sungguh-sungguh untuk kebaikan	628	43,4
c. Memerangi kebodohan dan kemiskinan	261	18,0
d. Terhadap semua kemungkar	437	30,2
e. Tidak mengisui	11	0,8
Jumlah	1446	100

responden menyatakan jihad lebih tepat ditujukan kepada segala bentuk kemungkaran. Pandangan ini sebetulnya merupakan modal kul-

Islam sekarang ini termasuk yang sedang di dholimi, dimusuhi. Kalau ada dalam bentuk apa dan siapa yang mendholimi tersebut.

Tabel 11
Pandangan tentang tindak kekerasan

Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a. Setuju kemungkaran harus dilawan	154	10,7
b. Tidak setuju, harus bil hikmah walmauidhotul hasanah	460	31,8
c. Tidak setuju Islam tidak mengajarkan kekerasan	593	41,0
d. Tidak setuju karena kekerasan tidak menyelesaikan	222	15,4
e. Tidak mengisi	17	1,3
Jumlah	1446	100

tural bagi pemerintah untuk melangkah memberantas segala bentuk penyakit sosial, moral dan kejahatan lainnya, seperti; miras dan narkoba, pencurian, perjudian, korupsi, KKN, perzinaan dsb. yang ternyata hampir-hampir saja menenggelamkan negara, menyensensasikan masyarakat.

Sebagian kecil responden masih menganggap relevan jihad bermakna perang terhadap orang yang memurangi atau memusuhi Islam dan umat Islam. Pandangan ini secara normative tidak ada persoalan sebab siapapun yang memusuhi atau menyerang orang Islam pasti akan dibalas dengan tindakan yang setimpal. Persoalannya apakah umat

Para responden umumnya tidak setuju menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan ajaran jihad (dalam arti bersungguh-sungguh berbuat kebaikan, melawan kebodohan dan kemiskinan). Berbagai alasan karena Islam mengajarkan dakwah dengan kearifan, bilhikmah wal mauidhotul hasanah. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Dan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan, bahkan menambah deretan kekerasan.

Pandangan tersebut nampaknya sejalan dengan kalangan masyarakat yang melihat agama sebagai sumber etika-moral, yang didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar dari pada

orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (*religio-ethics*) dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Ia bahkan menganggap pelaksanaan hukum agama itu sangat problematis dan akan dapat mengganggu integrasi bangsa. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran agama.

Sementara responden yang menyetujui tindak kekerasan atau tidak ada kompromi dengan kemungkaran, didasarnya pada semangat anti kemungkaran sebagai pandangan rasa tanggung jawab terhadap tuhan maupun masyarakat yang harus diselamatkan dari kehancuran karena kemungkaran yang semakin mengawatirkan. Fenomena tersebut sejalan dengan apa yang oleh Erich Fromm dalam bukunya *Psychoanalysis and Religion* membagi dua tipe keberagamaan, yaitu keberagamaan otoritarian dan keberagamaan humanistik. Tipe keberagamaan otoritarian adalah keberagamaan yang membelenggu yang biasanya menundukkan dirinya dihadapan otoritas dan menghilang-

kan unsur rasionalitas. Keberagamaan seperti itu biasanya terikat kepada kekuasaan otoritas di dalam agama. Kekuasaan otoritas itu bisa berupa 'kependetaan' atau 'kekiaan'. Kebebasan pribadi dikorbankan lewat penundukan diri kepada kekuasaan otoritas. Dalam keberagamaan otoritarian ini kebajikan adalah *obedience* dan dosa adalah *disobedience*. Menurut Erich Fromm, keberagamaan seperti ini akan melahirkan etika otoritarian yang ditandai ketidakmampuan berpikir kritis atau pembungkaman terhadap sikap-sikap kritis terhadap ajaran agamanya.

Pada tipe keberagamaan humanistic agama dijalankan dalam modus *being* bukan *having* Agama dalam modus *having* ditandai dengan keyakinan kuat terhadap kebenaran keberagamaan kita dan mengklaim selain agama kita tidak ada kebenaran. Keberagamaan dalam modus *being*, orang menjadikan agama sebagai sebuah proses yang terus-menerus. Keberagamaan *humanistic* ini akan melahirkan *humanistic ethics* yang ditandai dengan keberagamaan yang rasional, tetapi juga pada saat yang sama juga amat toleran, cinta-kasih.⁴

⁴ Eko Wijayanto, *Menumbuhkan keberagamaan yang humanistik*, Kompas, Jumat : 3 Agustus 2001.

E. Etos Belajar atau Pendidikan Islam

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang berupaya mewujudkan masyarakat Indonesia Baru yang mencakup dua aspek: 1) mengatasi krisis nasional yang berkepanjangan bahkan hampir-hampir saja menghancurkan NKRI dengan membangun kembali masyarakat dan bangsa yang lebih demokratis, 2). Mempersiapkan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat baru masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, sejahtera. Perwujudan masyarakat dengan kualitas tersebut harus didukung oleh manusia Indonesia baru yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, sehat, mandiri, cinta tanah air, sadar hukum dan lingkungan, menguasai iptek, mempunyai etos kerja tinggi dan disiplin.

Dengan visi masyarakat Indonesia Baru tersebut, maka misi pendidikan nasional termasuk di dalamnya pendidikan agama dan keagamaan lebih diarahkan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, demokratis, kreatif, inovatif,

berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, dan menguasai iptek. Untuk mewujudkan misi tersebut maka dalam membangun pendidikan nasional mencakup: 1). Lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai 2). Pendidikan yang mempersiapkan SDM yang menguasai iptek, 3). Prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan secara demokratis, pengakuan kembali prinsip desentralisasi dan otonomi serta manajemen yang efisien dan efektif.

Lembaga pendidikan agama dan keagamaan khususnya pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dalam menghadapi setting sosial atau perkembangan lingkungan strategis yang ada, menuntut masyarakat pesantren termasuk para pengelola, penyelenggara dan pemegang kebijakan untuk melakukan refleksi, mengkaji ulang, mengkritisi kemungkinan melakukan redefinisi dan reposisi sesuai dengan perubahan paradigma, visi dan misi kehidupan bangsa Indonesia di era reformasi dengan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki lembaga pendidikan pesantren.

Perkembangan pesantren dimasa lampau sangat tidak menguntungkan baik akibat politik pendidikan pemerintah Kolonial Belanda yang

diskriminatif maupun kebijakan pemerintah Indonesia yang belum sepenuhnya menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan alternatif, menyebabkan pesantren menghadapi berbagai kesulitan dan “terisolir” dari arus modernisasi. Upaya masyarakat pesantren untuk menghilangkan isolasi tsb. terlihat mulai dari lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas yang menetapkan pesantren sebagai bagian dari system pendidikan nasional.

Sambil menunggu PP tentang system pendidikan pesantren, masyarakat pesantren telah melakukan upaya-upaya penyesuaian system

pendidikan mulai dari mempertahankan system salafi murni, salafi modern sampai kepada adopsi system pendidikan modern. Semuanya dilakukan secara cerdas dan penuh kehati-hatian dengan prinsip memelihara yang baik yang sudah ada, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Al Muhafadhotu al qadimi sholih, wal ahdu bil jadidil ashlah. Persoalannya adalah: 1). Apa latarbelakang atau motivasi para santri belajar di pesantren, 2). bagaimana system pendidikan pesantren yang dianggap ideal atau sesuai dengan harapan para santri. menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut.

Tabel 12

Latarbelakang dan harapan santri belajar di pesantren

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Tafaqquh fiddin	313	21,6
b. Belajar agama dan umum	40	2,8
c. Agama, umum dan keterampilan	45	3,1
d. Agama, umum, keterampilan dan mandiri	1035	71,6
e. Tidak mengisi	13	1,0
Jumlah	1446	100

Dari table tersebut terlihat minat santri untuk tidak sekedar belajar agama semata (tafaqquh fiddin), tetapi lebih dari itu mereka cenderung belajar agama, umum, berbagai keterampilan serta kemandirian. Kkecenderungan ini merupakan proses pergeseran orientasi pesantren yang sangat signifikan yang selama ini terbentuk image bahwa pesantren hanya belajar agama. Karenanya pesantren-pesantren yang selama ini dikenal sebagai peantren salafi murni, telah berubah menjadi salafi modern yang mengadopsi dan menyelenggarakan pendidikan agama dan umum.

Demikian pula semakin banyaknya pesantren yang memberikan berbagai jenis keterampilan, atau melibatkan para santri untuk berbagai kegiatan keterampilan yang dikelola pesantren. Mulai dari koperasi, wartel, peternakan, wisma, pertanian, guru wiyata bhakti sampai kepada mengelola cabang pesantren. Hasilnya terlihat bagaimana para alumni pesantren yang memiliki kelebihan baik dalam penguasaan ilmu agama, penguasaanj bahasa asing, kemampuan membaca kitab kuning, kepemimpinan yang santun serta mempau melanjutkan ke perguruan tinggi.

Tabel 13
 Pandangan Santri tentang Sistem pendidikan ideal

Alternatif jawaban	Jumlah	%
a. Pendidikan salafi	279	19,3
b. Pendidikan modern di pesantren	664	45,9
c. Pesantren modern	274	18,9
d. Pendidikan modern	201	13,9
e. Tidak mengisi	28	1,9
Jumlah	1446	100

Berdasarkan motivasi dan harapan tersebut maka system pendidikan yang dianggap ideal adalah system pendidikan yang mengandung unsur pendidikan modern dan kepesantrenan. Jawaban responden menunjukkan kecenderungan keterbukaan menerima system modern dalam artian pendidikan yang berorientasi modernitas dan berbasis iptek tapi tetap mempertahankan kultur pesantren.

Sementara responden yang menjawab atau memilih pendidikan salafi dalam artian belajar agama semata, ternyata jumlahnya cukup kecil. Karenanya terlihat banyak pesantren sudah menyelenggarakan pendidikan modern namun tetap mempertahankan lingkungan Kultural salafinya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manusia dalam pandangan hidup santri berperan sebagai khalifah (pengelola alam seisinya), tidak diklaim sebagai milik ummat Islam melainkan untuk semua manusia tanpa membedakan ras, etnik dan agama berdasarkan kompetensi, moralitas dan dapat diterima oleh semua golongan.

Peran kehambaan bukanlah bentuk keterpisahan dengan peran kekhalifahan, melainkan sebagai bentuk persyaratan atau kompetensi moralitas dalam melaksanakan peran kekhalifahan.

2. Pluralitas diakui sebagai sunnatullah yang mengajarkan kesetaraan, agar dapat hidup harmonis, inklusifisme dan bermuara kepada keadilan yang lebih bermartabat bersama untuk semua keragaman sebagai dasar etika sosial yang bersumber dari akhlakul karimah.
3. Konsep Islam kaaffah dimaknai sebagai integrasi antara agama dan negara. Namun dalam penerapannya dilakukan melalui pendidikan, dakwah dan muamalah. Jihad sebagai upaya penerapan Islam Kaaffah ternyata prosentasenya sangat kecil.
4. Jihad dalam konteks kekinian lebih dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh memerangi kebodohan dan kemiskinan, berbuat kebaikan, memerangi kemungkaran dan hanya sebagian kecil yang memaknai perang terhadap orang kafir. Santri tidak setuju menggunakan kekerasan atas nama jihad, karena Islam mengajarkan konsep dakwah

bilhikmah wal mauidhotil hasanah.

5. Para santri mengakui ada nilai-nilai kebenaran pada setiap agama, namun Islam sebagai agama yang dianut tetap diyakini sebagai agama paling benar. Karenanya bagi mereka agama bukan untuk dibandingkan tetapi lebih pada diamalkan. Mereka yang mengklaim kebenaran hanya pada Islam prosentasi nya cukup kecil.
6. Bagi santri ilmu yang perlu dipelajari tidak hanya ilmu agama, juga ilmu umum dan keterampilan. Oleh karenanya sistem pendidikan yang ideal yang diinginkan santri adalah pendidikan modern di pesantren.

B. Saran Rekomendasi

- 1 Isu radikalisme dan terorisme ternyata di luar *frame* pandangan hidup santri. Oleh karena itu perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan pandangan hidup santri yang inklusif, pluralistik, anti kekerasan dan memiliki komitmen moral kepada kalangan yang lebih luas.
- 2 Perlu dilakukan dialog berkeseimbangan dan bermartabat dikalangan

an sesama anak bangsa termasuk komunitas pesantren bagi penguatan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadaban.

- 3 Pesantren memiliki akar kultural, akar sosial dan akar keagamaan yang kuat bagi kelangsungan NKRI, maka sudah sewajarnya diberikan advokasi, asistensi serta diperlakukan secara adil termasuk dalam pengembangan sistem pendidikan.

SUMBER BACAAN

Judith Friedman Hansen, *Sociocultural Perspectives On Human Learning: An Introduction to Educational Anthropology*, Prentice-Hall, New Jersey, 1979,

Dr. Azyunardi Azra "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara abad XVI dan XVII"; Mizan, Bandung, 1996.

Prof, Dr Azra Azyunardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, Logos, Jakarta, 2002, hal.104-105.

A. Hanafi, MA, *Pengantar Teologi Islam*, Jakarta : Pustaka Husna, 1990

- Mastuhu, *Gaya dan Suksesasi Kepemimpinan Pesantren*, Dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Volume II, Nomor 7 Tahun 1990
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Santri* (Jakarta: LP3ES, Cetakan IV, 1985),
- Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, (terj), Mulyadhi Kertanegara, (Jakarta: Paramadina, 2002),
- Yusuf, M. Yunan, dkk. (ed), *Ensiklopedia Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005)
- Dr. Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaharuan Salafi & Dakwah Reformasi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Oktober 2005, hal. 33
- Nurcholish Madjid (ed), *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hal.44
- M. Yunan Yusuf, *Teologi Muhammadiyah, Cita Tajdid dan Realitas Sosial*, Jakarta: IKIP Muhammadiyah, 1995, hal. 3
- Deliar Noor, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996, hal. 317
- Abdul Munir Mulkan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sipress, 1994, hal. 79-86
- Azhim, Said Abdul, Ibnu Taimiyah; *Pembaharuan Salafi & Dakwah Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, (terj), Mulyadhi Kertanegara, (Jakarta: Paramadina, 2002).
- Madjid, Nurcholish (ed), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Mulkan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Sipress, 1994).
- Noor, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, (terj), (Bandung: Pustaka, 1994).
- Yusuf, M. Yunan, dkk. (ed), *Ensiklopedia Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005)
- Yusuf, M. Yunan, *Teologi Muhammadiyah, Cita Tajdid dan Realitas Sosial*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah, 1995).
- Radea Juli A Hambali, *Agama, Fundamentalisme, dan Pluralisme Nilai*,

Kompas, Jumat, 27 September
2002.

Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, yang diterjemahkan oleh Drs. M. Maghfur, Bangil-Jatim: Darul Ummah, cetakan VI, 2002, p: 9.

Suwardi Putro, *Mohammed Arkoun tentang Islam Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998,

Eko Wijayanto, *Menumbuhkan keberagamaan yang humanistik*, Kompas, Jumat : 3 Agustus 2001.